

## Upaya Peningkatan Kesehatan Anak Indonesia

### HIGHLIGHTS

- Pandemi covid-19 sepanjang tahun 2020-2021 berpengaruh pada indikator kesehatan nasional namun juga menurunkan cakupan imunisasi dasar pada anak.
- Program Bulan Imunisasi Anak (BIAN) dimaksudkan untuk meningkatkan kembali cakupan imunisasi anak sekaligus meningkatkan daya tahan akan terhadap KLB P3DI. Rendahnya capaian BIAN, khususnya di luar Jawa dan Bali tidak lepas dari belum meratanya fasilitas Kesehatan di berbagai daerah.
- Rasio Puskesmas per kecamatan beberapa provinsi masih lebih rendah dari rata-rata nasional (1,4), yaitu Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara masing-masing sebesar 1,3. Kemudian, Aceh, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Kepulauan Riau masing-masing 1,2.
- Perlu penguatan peran pemerintah daerah dan peran kader kesehatan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya imunisasi anak.

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal  
DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

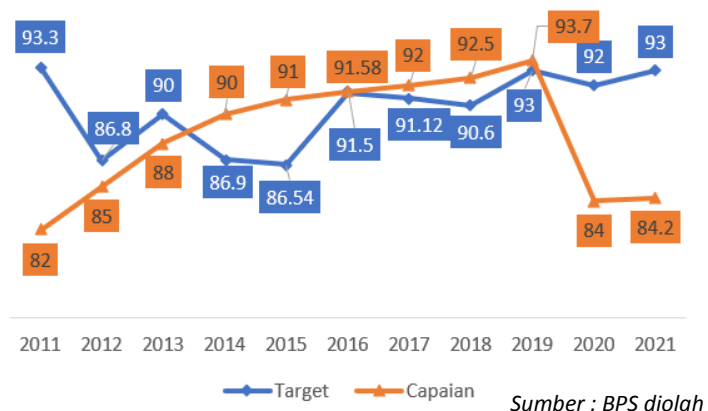
#### Redaktur:

Slamet Widodo · Firly Nur Agustiani · Linia  
Siska Risandi

Penulis : Slamet Widodo

Tahun ini pemerintah melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) secara serentak dalam dua tahap yaitu bulan Mei dan Agustus 2022 melalui pemberian imunisasi tambahan Campak-Rubella serta melengkapi dosis imunisasi Polio dan DPT-HB-Hib yang terlewat. Sasarannya adalah anak umum 9 bulan s/d kurang dari 12 tahun. BIAN dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap I yang dimulai bulan Mei 2022 mencakup wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan tahap II mulai bulan Agustus 2022 untuk wilayah Jawa dan Bali. Upaya ini dimaksudkan untuk mengejar cakupan imunisasi dasar lengkap anak yang sempat menurun pada periode pandemi covid-19 di tahun 2020.

**Gambar 1. Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi (0-11 bulan)**



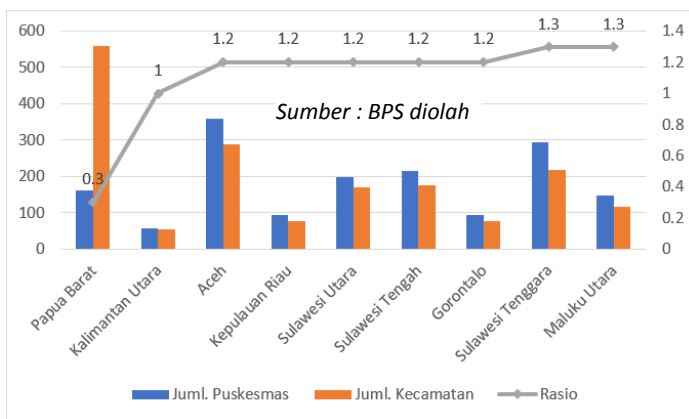
Pandemi covid-19 menurunkan capaian cakupan imunisasi dasar karena sejumlah fasilitas Kesehatan membatasi layanannya, tutup sementara karena terpapar covid-19 atau adanya kekhawatiran untuk datang ke fasilitas Kesehatan saat itu. Capaian imunisasi dasar lengkap nasional pada tahun 2020 dan 2021 turun menjadi 84 persen dari capaian tahun 2019 yang sebesar 93,7 persen. Sementara capaian imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib 4 dan Campak Rubella 2 pada anak usia di bawah dua tahun masing-masing masih sebesar 56,2 persen dan 58,5 persen pada tahun 2021. Kondisi pandemic covid-19 juga menyebabkan 1,7 juta anak belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap selama tahun 2019-2020.

Angka keluhan Kesehatan pada anak semakin rendah seiring bertambahnya kelompok umur. Anak umur 0-4 tahun (balita) merupakan kelompok umur anak yang paling banyak mengalami sakit yaitu sebesar 34,09 persen pada tahun 2021. Sementara secara nasional persentase anak umur 0-17 tahun yang mempunyai keluhan Kesehatan dalam sebulan terakhir pada tahun 2021 masih sebesar 24,68 persen. Beberapa provinsi masih berada di atas rata-rata nasional yaitu Provinsi NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, DKI Jakarta,

dan Gorontalo. Kondisi tersebut di atas berpotensi menurunkan daya tahan anak dan rentan terhadap berbagai kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) seperti campak, difteri, dan rubella. Kasus gagal ginjal yang terjadi akibat adanya cemaran kimia pada obat tertentu dan hepatitis akut di tahun 2022 dapat semakin parah karena menurunkan daya tahan tubuh anak. Di sisi lain, cakupan imunisasi dasar lengkap pun tidak merata. Hingga awal Desember 2021, baru ada 10 provinsi yang cakupan imunisasi dasar lengkapnya di atas 60 persen. Provinsi itu ialah Banten, Bali, Bengkulu, Bangka Belitung, Gorontalo, Jambi, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Per 12 Oktober 2022, cakupan imunisasi melalui BIAN di luar Pulau Jawa dan Provinsi Bali rata-rata mencapai 63 persen cakupan. Sementara cakupan di Pulau Jawa dan Provinsi Bali mencapai 93 persen. Rendahnya cakupan imunisasi di luar Jawa tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi antara lain belum meratanya fasilitas layanan kesehatan seperti Puskesmas dan Posyandu.

Rata-rata rasio Puskesmas per kecamatan di Indonesia adalah 1,4. Namun demikian, masih terdapat 11 dari 34 provinsi yang memiliki rasio di bawah rata-rata nasional Provinsi. Provinsi yang memiliki rasio Puskesmas di bawah rata-rata nasional adalah Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara masing-masing sebesar 1,3. Kemudian, Aceh, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Kepulauan Riau masing-masing 1,2.

### Gambar 2. Provinsi dengan Rasio Puskesmas di bawah Rata-rata Nasional



Menurut Kementerian Kesehatan, rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa belum semua kecamatan memiliki Puskesmas dan adanya kondisi geografis yang sulit dan rata-rata tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah di daerah tersebut. Artinya, akses terhadap pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi di wilayah dengan rasio Puskesmas di bawah satu.

Belum meratanya persebaran jumlah Puskesmas tentunya dapat didukung dengan keberadaan Posyandu yang dapat lebih menjangkau masyarakat di perdesaan. Di tahun 2022 ini pemerintah mengaktifkan kembali 300 ribu Posyandu yang operasionalnya sempat terhenti di masa pandemic covid-19. Namun saat ini jumlah fasilitas pelayanan di Posyandu juga masih terbatas. Dari jumlah Posyandu sebanyak 296.777 di tahun 2019, hanya sebesar 63,6 persen (188.855 Posyandu) merupakan Posyandu aktif yang telah memenuhi kriteria :

- 1) Melakukan kegiatan rutin Posyandu minimal 8 kali/tahun
- 2) Memiliki minimal 5 orang kader
- 3) Sebanyak 3 dari 4 layanan di Posyandu memenuhi cakupan minimal 50 persen sasaran sebanyak 8 bulan dalam satu tahun.

Untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi anak, tidak hanya dibutuhkan upaya pembangunan layanan Kesehatan yang merata, namun juga membutuhkan dukungan/komitmen dari pemerintah daerah. Komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan Posyandu aktif masih sebesar 47,7 persen di tahun 2021 atau sebanyak 246 kabupaten/kota dan hanya terdapat 31 kabupaten/kota (6,0 persen) yang memiliki minimal 80 persen Posyandu aktif di seluruh Indonesia. Salah satu indikator pembinaan Posyandu aktif di pemda adalah memiliki Pokjandal Posyandu yang disahkan melalui keputusan Bupati/Walikota. Pokjandal adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Sebagai garda terdepan peningkatan kesehatan masyarakat, peran Puskesmas dan Posyandu menjadi sangat strategis untuk mendukung berbagai program pemerintah antara lain pemenuhan imunisasi dasar dan lanjutan lengkap, imunisasi tambahan untuk mencegah KLB P3DI, dan percepatan penurunan stunting. Peningkatan peran para kader kesehatan baik di Puskesmas dan Posyandu diharapkan dapat membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memberkahi anak dengan imunisasi lengkap baik dasar, lanjutan dan tambahan.